BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
Triwulan I
TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

0821 4474 6040 | Pengadilan Agama Maumere | pa.maumere@gmail.com | @pa.maumere | pa-maumere.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 2
A. Latar Belakang 2
B. Maksud Dan Tujuan 2
C. Landasan Hukum 3
D. Rencana Kerja 3
BAB II METODOLOGI 5
A. Metode Penelitian 5
B. Populasi dan Sampel 5
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis 5
D. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control* 5
E. Teknik Analisis Data 6
F. Tahapan Pelaksanaan 6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI 9
A. Profil Responden 9
1. Tingkat Pendidikan Responden 9
2. Pekerjaan Responden 10
3. Kelompok Usia Responden 10
4. Layanan yang Digunakan 11
B. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator 12
1. Indikator Manipulasi Peraturan 12
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan 13
3. Indikator Menjual Pengaruh 14
4. Indikator Tranparansi Biaya 15
5. Indikator Transaksi Rahasia 16
6. Indikator Biaya Tambahan 17
7. Indikator Hadiah 18
8. Indikator Transparansi Pembayaran 19
9. Indikator Percaloan 20
10. Indikator Perbuatan Curang 21
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan 22
D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan 23
E. Kuisioner IPAK 2023 24
BAB IV PENUTUP 27
A. Hasil Survei Persepsi Korupsi 27
B. Tindak Lanjut Yang Dilakukan 28

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada satuan kerja Pengadilan Agama Maumere berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan dilakukannya Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang menghasilkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. ZI menuju wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayan Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

b. Penyiapan Bahan

1) Kuisioner
2) Bagian dari kuisioner/pengantar
3) Kelengkapan peralatan.

c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1) Jumlah Responden.
2) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

d. Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
b. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
c. Pengujian kualitas dan validitas data.
d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu setiap 3 (tiga) bulan dalam satu tahun dengan menggunakan kuisioner kertas dan online.

BAB II
METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 75 responden.

Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar- benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini;
2. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator;
3. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 – 100;
4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendektai nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

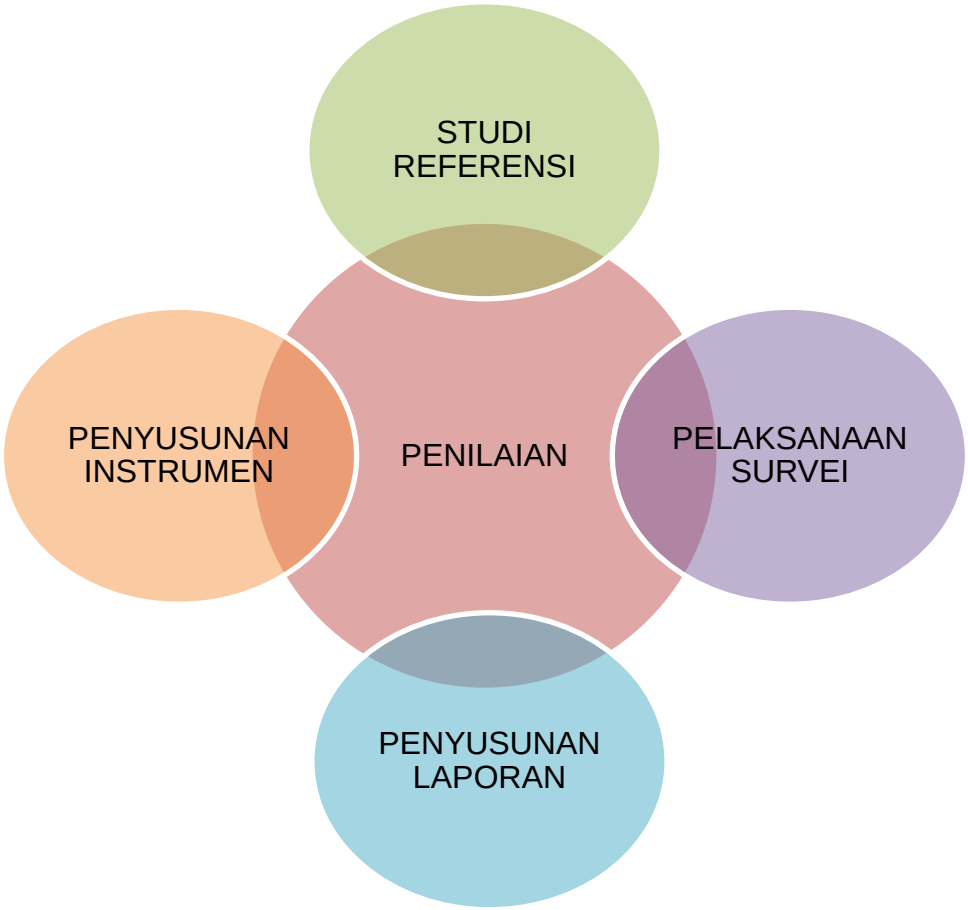

Gambar 2. 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 2. 1
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No.	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 2. 2
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	1	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60-3,064	65,00-76,60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di satuan kerja Pengadilan Agama Maumere mayoritas memiliki latar pendidikan SD kebawah sebesar 42% dan SLTA sebesar 42%.

Tabel 3. 1
Tingkat pendidikan responden

Ket	Jumlah	Persentase
1. Tidak sekolah	1	4%
2. SD kebawah	10	42%
3. SLTP	2	8%
4. SLTA	10	42%
5. D1/D2/D3/D4	0	0%
6. S1	1	4%
7. S2 keatas	0	0%
TOTAL	**24**	**100%**

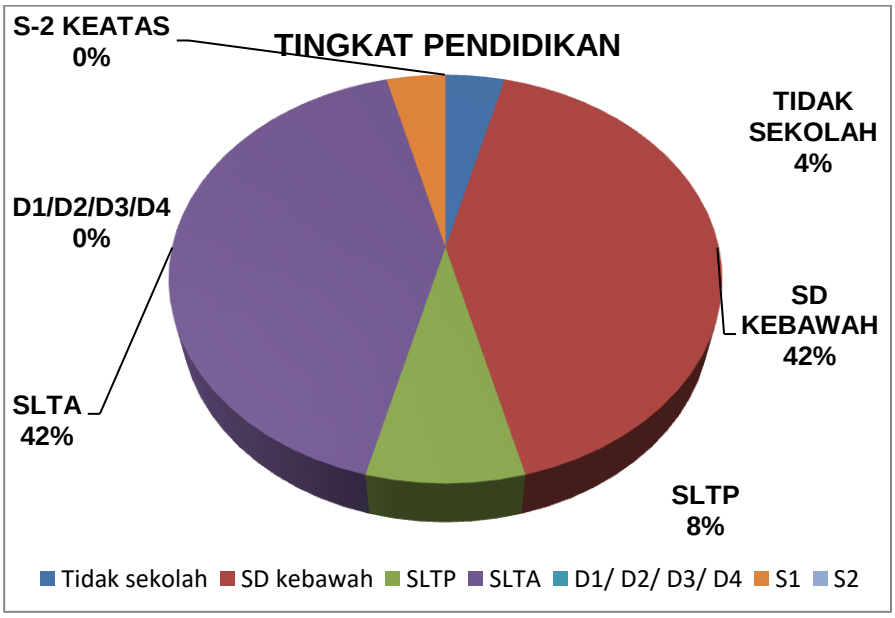

Gambar 3. 1
Diagram Persentase Tingkat Pendidikan Responden

2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 54% Responden pengguna layanan pada satuan kerja Pengadilan Agama Maumere berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga/ Mengurus Rumah Tangga.

Tabel 3. 2
Jenis Pekerjaan Responden

Ket	Jumlah	Persentase
1. PNS/ TNI/ POLRI	0	0%
2. Pegawai Swasta	1	4%
3. Wiraswasta/ Usahawan	1	4%
4. Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5. Petani/ Pekebun	1	4%
6. Nelayan/ Perikanan	8	33%
7. Mengurus Rumah Tangga	13	54%
8. Belum Bekerja	0	0%
TOTAL	**24**	**100%**

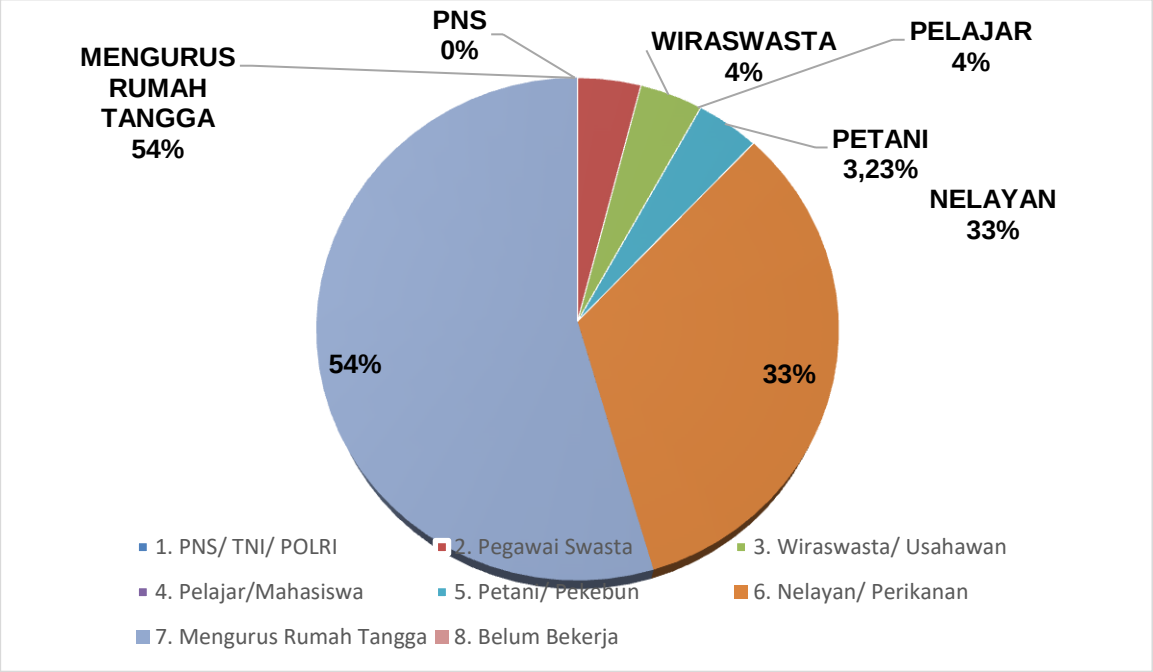

Gambar 3. 2
Diagram Persentase Jenis Pekerjaan Responden

3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada usia antara 20 tahun s/d 29 tahun sebesar 35,5%.

Tabel 3. 3
Usia Responden (dalam Tahun)

Ket	Jumlah	Persentase
1. <20 Thn	2	8%
2. 20 - 29 Thn	5	21%
3. 30 - 39 Thn	10	42%
4. 40 - 49 Thn	4	17%
5. > 49 Thn	3	13%
TOTAL	**24**	**100%**

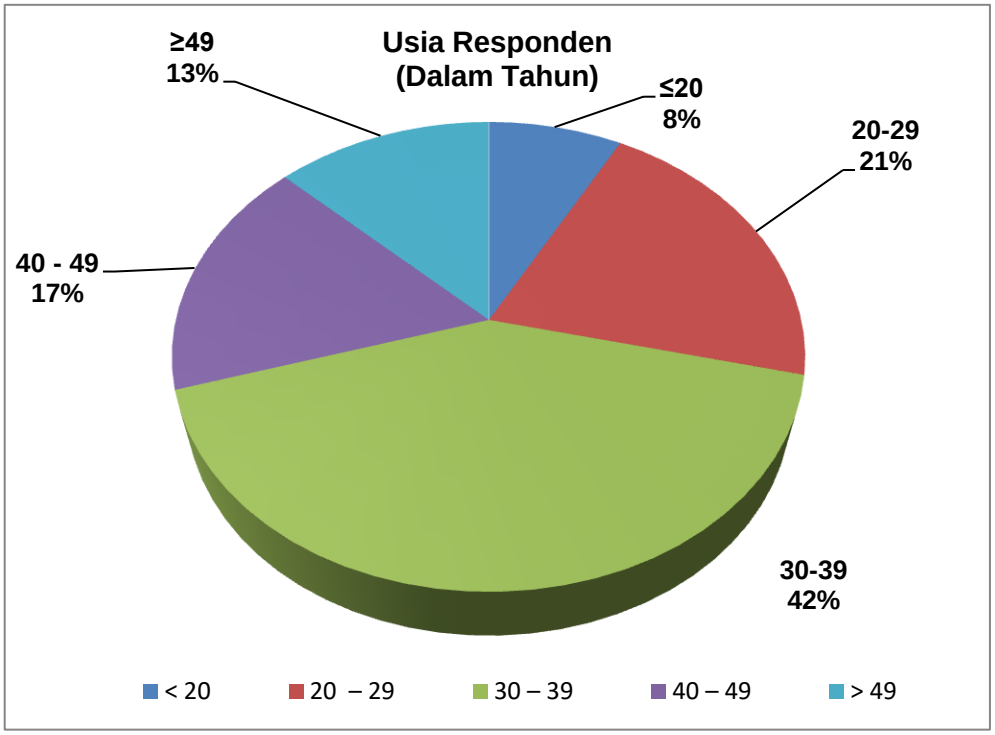

Gambar 3. 3
Diagram Persentase Usia Responden

4. Layanan yang Digunakan

Layanan yang digunakan oleh responden dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Maumere menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah penerima layanan permohonan Itsbat Nikah dengan Persentase sebesar 67%.

Tabel 3. 4
Jenis Layanan

Ket	Jumlah	Persentase
Cerai Gugat	6	25%
Itsbat Nikah	16	67%
Cerai Talak	2	8%
TOTAL	**24**	**100%**

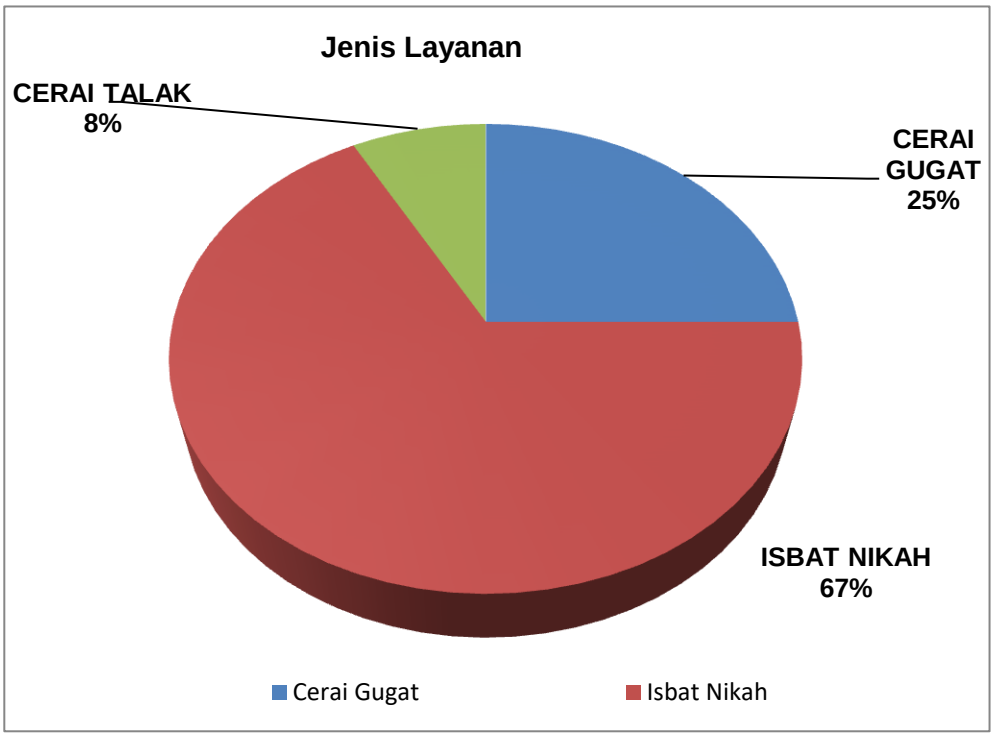

Gambar 3. 4
Diagram Persentase Jenis Layanan

B. Indeks Persepsi Korupsi untuk Setiap Indikator

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator manipulasi peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,97**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dari manipulasi peraturan.

Tabel 3. 5
Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	0	0%
2.	Buruk	0	0%
3.	Cukup baik	0	0%
4.	Baik	0	0%
5.	Tidak tau	1	5%
6.	Sangat baik	23	95%
Jumlah		**24**	**100%**

Gambar 3. 5
Diagram Persentase Indikator Manipulasi Peraturan

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,83**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dari tindakan penyalahgunaan jabatan.

Tabel 3. 6
Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat sering ada	0	0%
2.	Sering ada	0	0%
3.	Terkadang ada	0	0%
4.	Pernah ada	0	0%
5.	Tidak tau	6	25%
6.	Tidak pernah ada	18	75%
Jumlah		**24**	**100%**

Gambar 3. 6
Diagram Persentase Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil indeks sebesar **3.94**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** berbentuk tindakan Menjual Pengaruh.

Tabel 3. 7
Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat sering	0	0%
2.	Sering	0	0%
3.	Pernah ada	0	0%
4.	Terkadang ada	0	0%
5.	Tidak tau	2	8%
6.	Tidak pernah	22	92%
Jumlah		**24**	**100%**

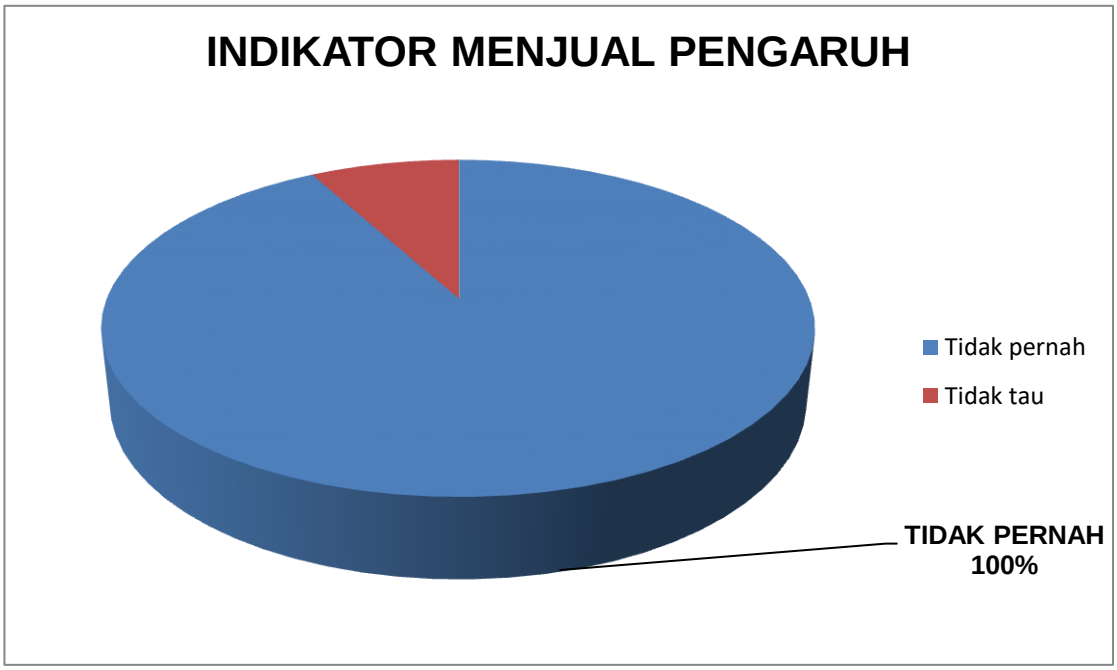

Gambar 3. 7
Diagram Persentase Indikator Menjual Pengaruh

4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **4.00**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dalam bidang Transaksi Biaya.

Tabel 3. 8
Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat sulit	0	0%
2.	Sulit	0	0%
3.	Cukup mudah	0	0%
4.	Mudah	0	0%
5.	Tidak tau	0	0%
6.	Sangat Mudah	24	100%
Jumlah		**24**	**100%**

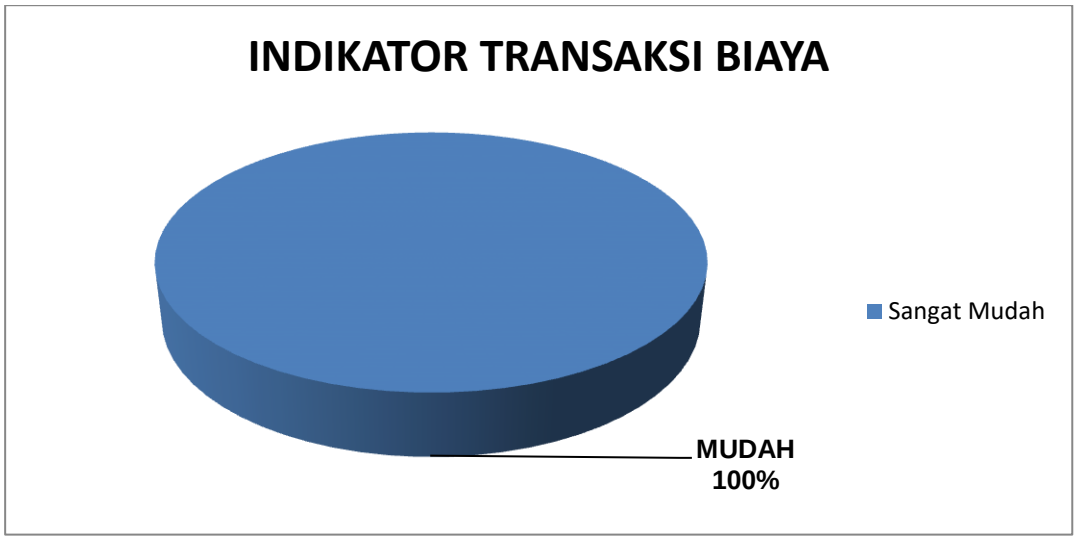

Gambar 3. 8
Diagram Persentase Indikator Transaksi Biaya

5. Indikator Biaya Tambahan

Dari Skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indicator biaya tambahan ini menunjukkkan hasil pada indeks **3,97**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dalam bentuk Biaya Tambahan.

Tabel 3. 9
Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak pernah sesuai	0	0
2.	Pernah sesuai	0	0
3.	Terkadang sesuai	0	0
4.	Sesuai	0	0
5.	Tidak tau	1	5%
6.	Selalu sesuai	23	95%
Jumlah		**24**	**100%**

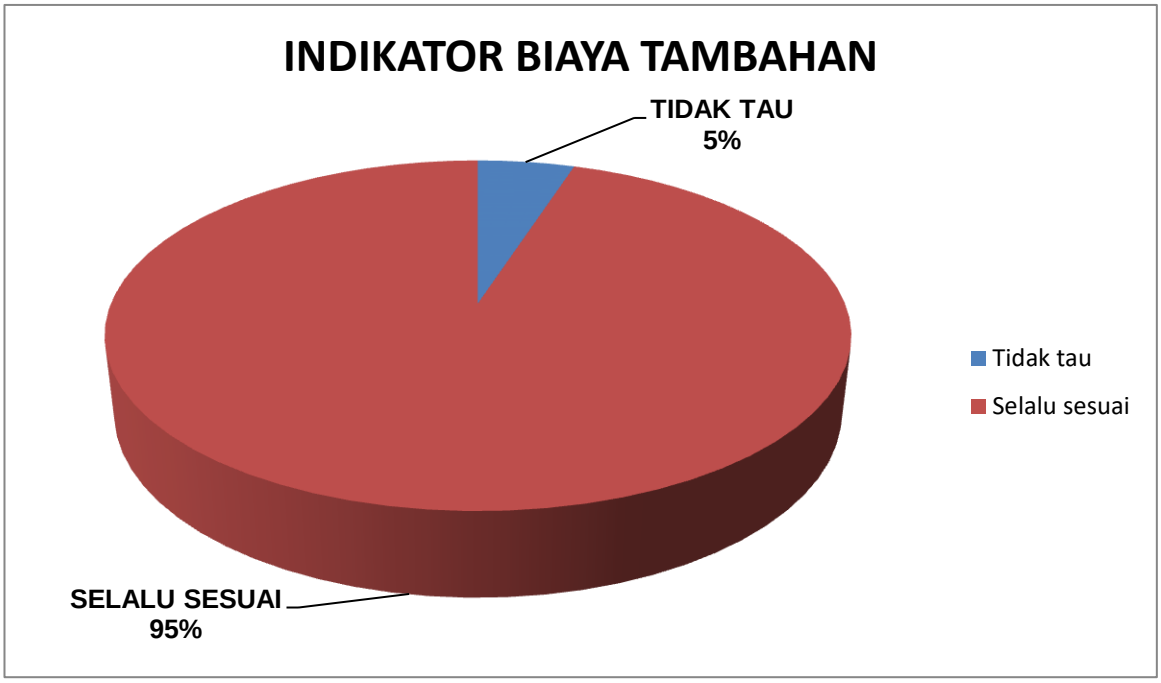

Gambar 3. 9
Diagram Persentase Indikator Biaya Tambahan

6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks **3,94**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dalam bentuk Pemberian Hadiah.

Tabel 3. 10
Indeks Pada Indikator Hadiah

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Sering	0	0%
2.	Sering	0	0%
3.	Terkadang	0	0%
4.	Pernah	0	0%
5.	Tidak Tau	2	8%
6.	Tidak pernah	22	92%
Jumlah		**24**	**100%**

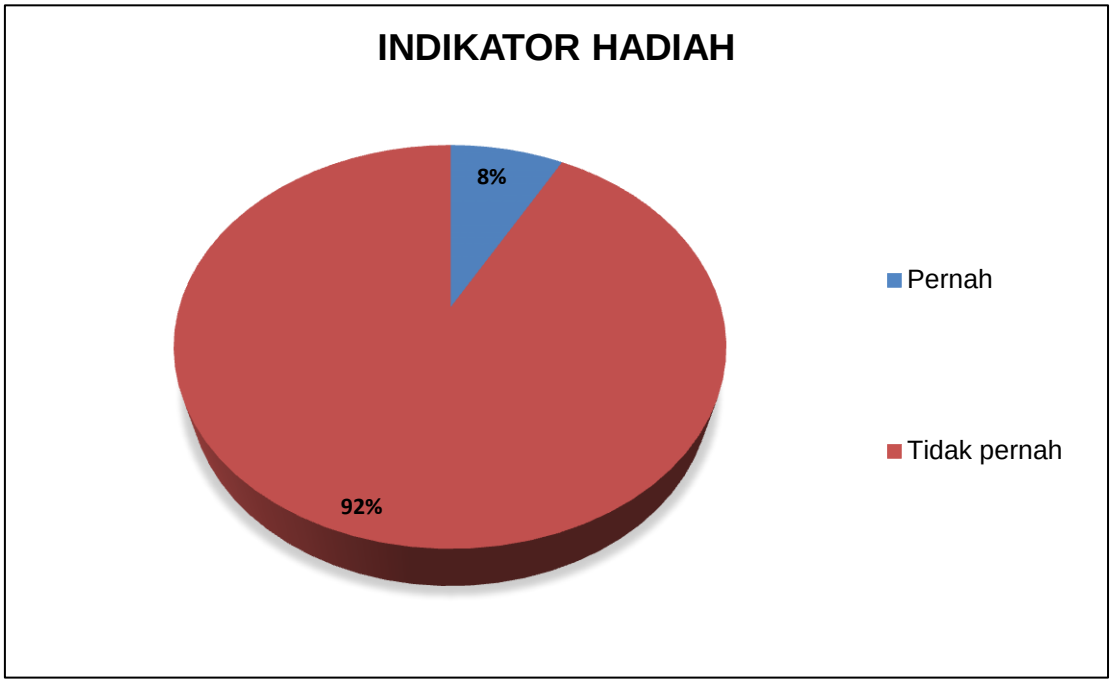

Gambar 3. 10
Diagram Persentase Indikator Hadiah

7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator transparansi pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks **3.97**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dalam Transparansi Pembayaran.

Tabel 3. 11
Indeks Pada Indikator Transparansi Pembayaran

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak pernah menerima	0	0
2.	Pernah menerima	0	0
3.	Terkadang menerima	0	0
4.	Menerima	0	0
5.	Tidak Tau	1	5%
6.	Selalu menerima	23	95%
Jumlah		**24**	**100%**

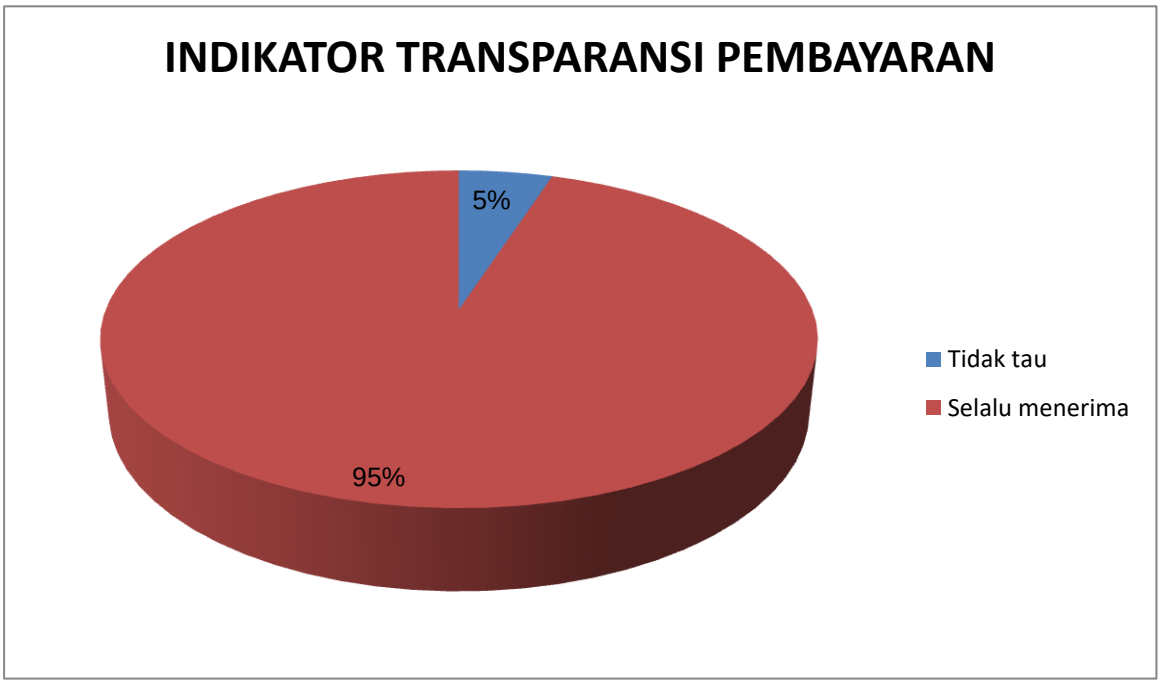

Gambar 3. 11
Diagram Persentase Indikator Transparansi Pembayaran

8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,86**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dalam bentuk Tindakan Percaloan.

Tabel 3. 12
Indeks Pada Indikator Percaloan

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat sering	0	0%
2.	Sering	0	0%
3.	Terkadang	0	0%
4.	Pernah	0	0%
5.	Tidak tau	5	21%
6.	Tidak pernah	19	79%
Jumlah		**24**	**100%**

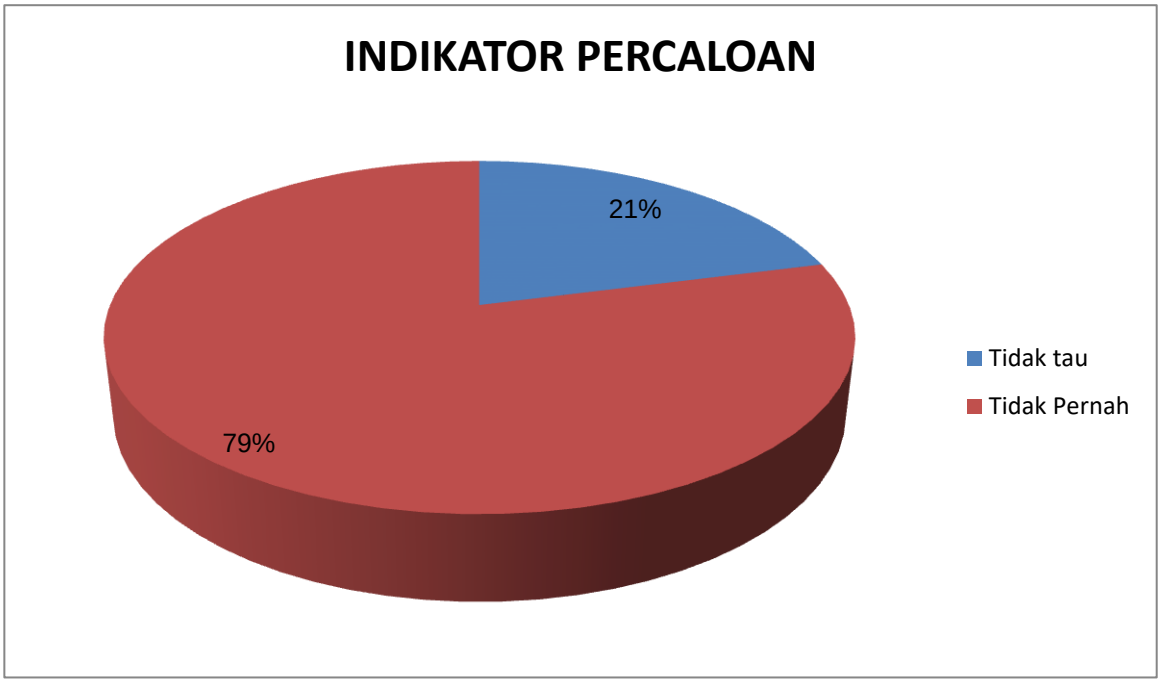

Gambar 3. 12
Diagram Persentase Indikator Transparansi Pembayaran

9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada indeks **4.00**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dalam bentuk Perbuatan Curang.

Tabel 3. 13
Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat sering	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Terkadang	0	0
4.	Pernah	0	0
5.	Tidak Tau	0	0
6.	Tidak pernah	24	100%
Jumlah		**24**	**100%**

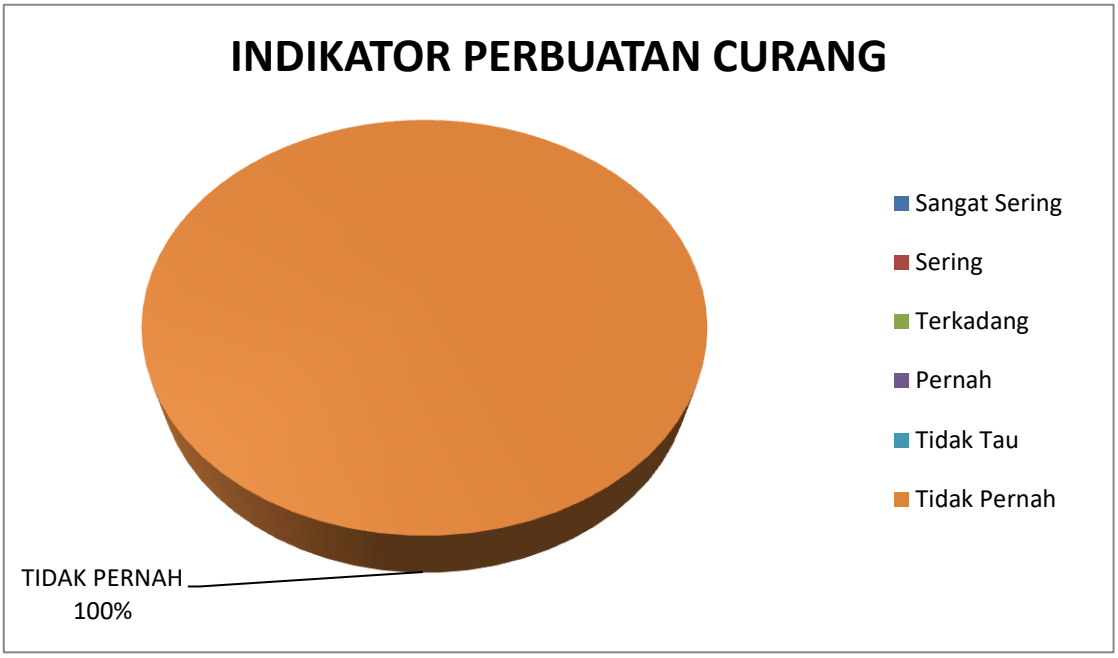

Gambar 3. 13
Diagram Persentase Indikator Perbuatan Curang

10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dalam bentu Transaksi Rahasia.

Tabel 3. 14
Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak tau	0	0
2.	Sangat sering	0	0
3.	Sering	0	0
4.	Terkadang	0	0
5.	Pernah	0	0
6.	Tidak pernah	24	100%
Jumlah		**24**	**100%**

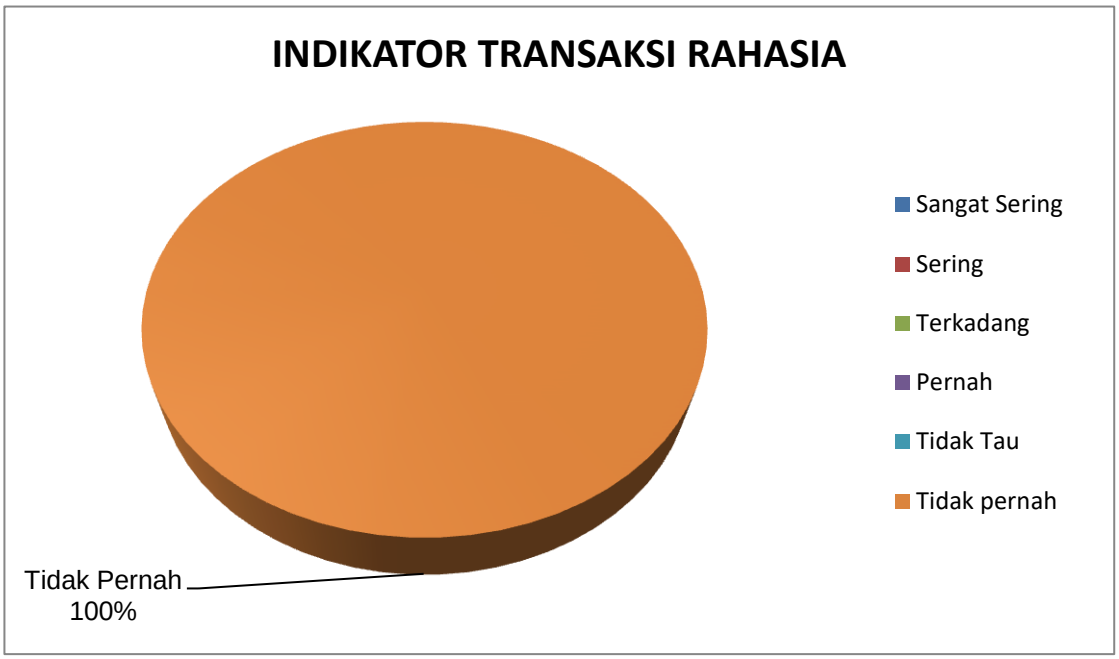

Gambar 3. 14
Diagram Persentase Indikator Transaksi Rahasia

C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Data yang terisi dengan lengkap sejumlah 24 kuisioner dari bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 pada Pengadilan Agama Maumere, diperoleh Indeks Persepsi Korupsi atas 10 indikator tersebut di atas sebesar **98,75**.

Tabel 3. 15
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maumere

No.	Unsur Pertanyaan	IPK	Konversi
1.	Manipulasi Peraturan	3,97	143
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,83	138
3.	Menjual Pengaruh	3,94	142
4.	Transaksi Biaya	3,97	144
5.	Biaya Tambahan	3,94	143
6.	Hadiah	3,97	142
7.	Transparansi Pembayaran	3,91	143
8.	Percaloan	3,86	139
9.	Perbuatan Curang	4,00	144
10.	Transaksi Rahasia	4,00	144
TOTAL NILAI		**39,50**	**1422**
Rata-rata		3,95	142,2

Indeks **98,75** tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI.** Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **88,31 – 100,00**.

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maumere. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16
Isian Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Agama Maumere

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maumere
1.	Agar pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan secara bergiliran di wilayah terluar di Kabupaten Sikka untuk mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat
2.	Agar petugas tidak menyalahgunakan kedudukan mereka dan memanipulasi pelayanan
3.	Agar pihak terkait tidak dipertemukan atau diarahkan langsung untuk bertemu dengan pejabat, hakim, dan pihak- pihak tertentu di lingkungan Pengadilan Agama Maumere, untuk menghindari terjadinya kecurangan, suap, dan gratifikasi
4.	Agar pihak yang berperkara meperhatikan dan melaksanakan himbauan penanganan gratifikasi yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, baner, spanduk serta media lainnya

Tabel 3. 17
Daftar Responden IPAK Periode Januari – Maret 2023

Nomor Kuisioner	Umur	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Jenis Pelayanan
1	17	1	2	1	7	Cerai Gugat
2	34	3	2	4	2	Cerai Gugat
3	38	3	1	2	6	Cerai Gugat
4	17	1	2	2	7	Cerai Gugat
5	52	5	2	3	7	Cerai Gugat
6	45	4	1	6	3	Itsbat Nikah
7	32	3	2	2	7	Itsbat Nikah
8	26	2	2	2	7	Itsbat Nikah
9	32	3	1	2	6	Itsbat Nikah
10	35	3	1	2	6	Cerai Talak
11	61	5	1	2	6	Cerai Talak
12	36	3	2	4	7	Itsbat Nikah
13	36	3	1	4	5	Itsbat Nikah
14	52	5	2	3	7	Cerai Gugat
15	34	3	1	4	6	Itsbat Nikah
16	40	4	2	4	7	Itsbat Nikah
17	40	4	2	4	7	Itsbat Nikah
18	40	4	2	4	7	Itsbat Nikah
19	21	2	1	2	6	Itsbat Nikah
20	36	3	2	2	7	Itsbat Nikah
21	27	2	2	4	7	Itsbat Nikah
22	25	2	1	2	6	Itsbat Nikah
23	25	2	2	4	7	Itsbat Nikah
24	39	3	1	4	6	Itsbat Nikah

E. Kuisioner IPAK Triwulan I Tahun 2023

1. Data Pencacah

Nama : Abdullah, S.H., M.H.
NIP : 19700608 200312 1 002

2. Data Unit Pelayanan

Unit Pelayanan : Kepaniteraan
Jenis Pelayanan : Cerai Gugat dan Permohonan Isbat Nikah

3. Data Masyarakat

a. Usia :

Tabel 3. 18
Usia Masyarakat

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1.	<20 Thn	2	8%
2.	20 - 29 Thn	5	21%
3.	30 - 39 Thn	10	42%
4.	40 - 49 Thn	4	17%
5.	> 49 Thn	3	13%
Jumlah		**31**	24

b. Jenis Kelamin :

Tabel 3. 19
Jenis Kelamin Masyarakat

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	42%	42%
2.	Perempuan	58%	58%
Jumlah		**31**	**100%**

c. Pendidikan Terakhir :

Tabel 3. 20
Pendidikan Terakhir Masyarakat

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	1	1	4%
2.	10	10	42%
3.	2	2	8%
4.	10	10	42%
5.	0	0	0%
6.	1	1	4%
7.	0	0	0%
Jumlah		**24**	**24**

d. Pekerjaan Utama :

Tabel 3. 21
Pekerjaan Utama Masyarakat

No.	Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
1.	PNS/ TNI/ POLRI	0	0%
2.	Pegawai Swasta	1	4%
3.	Wiraswasta/ Usahawan	1	4%
4.	Pelajar/ Mahasiswa	0	0%
5.	Petani/ Pekebun	1	4%
6.	Nelayan/ Perikanan	8	33%
7.	Mengurus Rumah Tangga	13	54%
8.	Belum Bekerja	0	0%
Jumlah		**24**	**24**

e. Jenis Layanan :

Tabel 3. 22
Jenis Layanan

No.	Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
1.	Cerai Gugat	6	25%
2.	Isbat Nikah	16	67%
3.	Cerai Talak	2	8%
Jumlah		**31**	**24**

4. Data Responden IPAK

Tabel 3. 23
Data IPAK Januari – Maret 2023

Nomor Kuisioner	Umur	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Jenis Pelayanan
1	29	2	1	7	4	Cerai Gugat
2	22	2	2	2	1	Isbat Nikah
3	42	4	1	2	2	Isbat Nikah
4	19	1	2	2	1	Isbat Nikah
5	53	5	1	2	2	Isbat Nikah
6	18	1	2	3	1	Isbat Nikah
7	22	2	2	3	1	Isbat Nikah
8	31	3	2	2	1	Isbat Nikah
9	24	2	1	4	2	Isbat Nikah
10	23	2	1	2	2	Isbat Nikah
11	30	3	2	2	1	Isbat Nikah
12	42	4	2	2	1	Isbat Nikah
13	30	3	1	2	2	Isbat Nikah
14	32	3	1	5	5	Isbat Nikah
15	34	3	1	2	2	Isbat Nikah
16	28	2	1	2	2	Isbat Nikah
17	23	2	2	4	1	Isbat Nikah
18	36	3	2	2	1	Isbat Nikah
19	24	2	1	2	2	Isbat Nikah
20	24	2	2	3	1	Isbat Nikah
21	34	3	2	2	1	Isbat Nikah
22	25	2	2	4	1	Isbat Nikah
23	26	2	2	2	1	Isbat Nikah
24	26	2	1	2	2	Isbat Nikah

BAB IV
PENUTUP

A. Hasil Survei Persepsi Korupsi

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Maumere diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Agama Maumere memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,95** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,97**.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,83**.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,94**.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,97**.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,94**.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,97**.
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,91**.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,86**.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **4,00**.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4,00**.

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Maumere Periode Januari - Maret 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,95** atau masuk pada persepsi Bebas dari Korupsi. Ditambah nilai yang diberikan oleh responden tidak ada yang memberikan kurang dari 3 dan beberapa indikator ada yang menunjukan peningkatan nilai kumulasi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan ada beberapa indikator yang mengalami kenaikan dan beberapa indikator mengalami penurunan. Diantara indikator yang mengalami penurunan adalah Indikator Manipulasi Peraturan dan Indikator Transaksi Rahasia.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap hasil survei tersebut Tim Survei IPK merekomendasikan agar dibentuk Tim Telusur apakah di Pengadilan Agama Maumere terdapat praktik Manipulasi Peraturan dan Indikator Transaksi Rahasia yang terjadi di Pengadilan Agama Maumere, sehingga dapat diketahui keberadaannya faktor tersebut dan perlu dilakukan penguatan pengawasan dari pimpinan terkait adanya indikasi

manipulasi peraturan dan transaksi rahasia oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere.

B. Tindak Lanjut Yang Dilakukan

Menindaklanjuti hasil tersebut, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan program sebagai berikut:

1. Dibuatkan Tim Penelusuran dan Investigasi tentang indikasi adanya praktik manipulasi peraturan dan indikator transaksi rahasia di Pengadilan Agama Maumere;
2. Optimalisasi penanganan pengaduan oleh masyarakat;
3. Monitoring secara berkala dari pimpinan dalam mencegah terjadinya praktik manipulasi peraturan dan indikator transaksi rahasia.

Ditetapkan di : Maumere
Tanggal : 30 Maret 2023
Ketua ZI
PA Maumere,

Achmad Iftauddin, S.Ag.